



Fungsi Lurah dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

Umbu Rizky Kalaway^{1*}, Saryono Yohanes², Josef Mario Montero³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: rizkykalaway@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: yohanessaryono@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia E-mail: mariomonteiro@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: The institution of the political district administered by the village chief plays the function of implementation of program and activities of community empowerment and services, peace and policing construction, infrastructure and public facilities keeping, and cultivate and facilitate the economic development increasing of the community in the village. This study is aimed to analyze the implementation and the impediment factors of the implementation of the role of the village chief in development and community welfare enhancement in Prailiu and Kambaniru Village of Kampera Subdistrict of East Sumba Regency. This was an empirical judicial research with sociological and conceptual approach. The data processing technique used were editing, coding, clarification and tabulation, and analyzed empirically appropriate to the gained data and with law theory, principle and norm persistent observance. The results revealed that the chief of the Prailiu and Kambaniru village of Kampera Subdistrict of East Sumba Regency have performed the development and community welfare enhancement role eventhough not optimal yet, which were (1) utilities and infrastructures development enhancing in the form of market place and the aid of rowing boat and trawl, piggies, goat and hen livestocks, motorcycle workshop equipments for the community, high road, footpath lane and drainage ditch construction, (2) of security indicator were coordination with the harmonious neighboring chief to respon and follow-up the community complaints, (3) of health indicator were social and working aids channelization, and third party cooperation, (4) of human resources enhancing indicator were community empowerment, social organization and community self-supporting mutual assistance building, and (5) of environment contamination prevention indicator were aid granting of kiosks and goods-selling basket building, market place and drainage ditch construction. The impediment factors of the role implementation were (1) public utilities and infrastructures still depended to the fund and budget availability, the poor condition of the high road and footpath lane, the market location less strategic, (2) institution apparatus slow-moving services given caused by lack of coordination, (3) socialization minimity, and (4) budget availability minimity. Researcher suggests that the concerned stake holders which are the chief and the all human resources apparatus set of the Prailiu and Kambaniru village institution should maintain even enhancing the community services performance and pay more attention to and solution finding efforts of the impediment factors of the village chief implementation in order to generate the community active participation in the village development for the reaching of the development goals that is to social welfare.

Keywords: Village chief, role, development, social welfare, village

1. Pendahuluan

Kepemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam suatu bentuk pemerintahan. Kepemerintahan yang baik ini cenderung lebih efektif dan efisien

dalam proses dan tujuannya sehingga dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik diterapkan di semua negara karena pemerintahan yang baik bisa menyeimbangkan keselarasan pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerja sama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Suatu daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan bagi masyarakat. Pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah bahkan hingga kota dan kabupaten dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 229 ayat 2 kelurahan bukan lagi salah satu dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang di sebut lurah selaku perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan tidak memiliki otonomi dalam mengelola kewilayahan termasuk Peraturan mengenai kelurahan yang dibuat di lingkungan wilayah kerjanya.

Lurah sebagai kepala kewilayahan tidak lagi memiliki kewenangan otonom terhadap wilayah kerjanya melainkan menerima tugas dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang dilimpahkan oleh camat sebagai pengendali wilayah otonom kelurahan.¹

Lurah melaksanakan tugas umum di pemerintahan di wilayah kelurahan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah, penyelenggaraan, ketertiban, ketentraman, penegakan peraturan undang-undangan, pembinaan dan lain sebagainya. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.²

Dalam rangka membangun dan mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerja sama yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Kelurahan sebagai organisasi

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah

² Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumba Timur yang Bersumber pada Dana Alokasi Umum Murni dan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020

pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, di mana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan.

Kondisi tersebut menurut pengamatan penulis juga terjadi di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Sumba Timur, terlihat masih lambatnya kerja pegawai kelurahan, dan pelayanan bersifat faktor kedekatan. Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru secara administratif pemerintahan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, para lurah di kedua kelurahan tersebut diperlengkapi dengan perangkat kelurahan baik secara organisatoris maupun personalia.

Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru masih terdapat beberapa titik jalan yang belum sepenuhnya dikerjakan secara maksimal oleh kelurahan seperti infrastruktur jalan raya dan pemindahan pasar serta pembuangan sampah. Dalam hal kesejahteraan masyarakat, pada indikator pelayanan kesehatan masih kurangnya alat medis dan kurangnya jumlah pegawai kesehatan, pada pelayanan pendidikan dan kebudayaan, tingkat pendidikan relatif bagus karena jumlah sekolah yang disediakan pemerintah sudah optimal namun yang perlu diperbaharui adalah pola pikir masyarakat, pada indikator pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, masyarakat sangat antusias dengan usaha mikro kecil namun yang menjadi perhatian masyarakat adalah soal dana karena masyarakat setempat untuk membuka usaha tersebut masih meminjam di koperasi, pada indikator lembaga masyarakat, pemerintah kelurahan sudah berusaha meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang mengharapkan imbalan, pada indikator ketenteraman dan ketertiban umum, faktor minuman keras beralkohol yang memicu dan mengganggu ketenteraman dan perilaku remaja yang melanggar ketertiban umum.

Pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *good governance* di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur. Fungsi lurah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di kedua kelurahan tersebut masih belum nampak secara nyata terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan meskipun secara administratif fungsi lurah sangat transparan.

Hal-hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi lurah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat fungsi lurah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur.

2. Metode

Penelitian dilakukan di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan 2 (dua) aspek penelitian yakni:

- a. Fungsi lurah, dalam pelaksanaan program dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator keamanan, kesehatan, sumber daya manusia (tingkat pendidikan) dan pencemaran lingkungan.
- b. Faktor-faktor penghambat fungsi lurah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), sosialisasi dan anggaran.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi dan pendekatan konseptual. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kelurahan dan anggota masyarakat, sedangkan sampel adalah responden yang menjadi informan, yang berjumlah 16 orang dan terdiri dari 2 orang lurah, 2 orang sekretaris kelurahan, 4 orang staf kelurahan dan 8 orang anggota masyarakat. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*.

Data primer meliputi konsep dan praktek fungsi lurah dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi lurah, yang bersumber dari keterangan hasil wawancara dengan responden yang menjadi informan dalam penelitian ini dan dari hasil pengamatan secara langsung (observasi) sedangkan data sekunder meliputi data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber dari kepustakaan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur terkait serta bahan hukum tersier petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti jurnal hasil penelitian, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan-bahan lainnya. Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan teknik wawancara sedangkan data sekunder dengan studi kepustakaan.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap editing, coding, klarifikasi, dan tabulasi. Seluruh informasi yang telah diolah dianalisis menggunakan metode empiris dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3. Fungsi Lurah Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

Pembangunan, sebagai sebuah konsep, terpaut pada konteks kajian terhadap perubahan, yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa, yang sifatnya direncanakan, dalam mencapai bentuk atau kondisi lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya.³ Bangsa, sebagai kumpulan orang yang hidup bersama, menempati suatu wilayah yurisdiksi tertentu secara bersama, dan dengan aturan-aturan yang disepakati bersama,

³ Rogers, dalam Rochajat

membentuk suatu sistem sosial kemasyarakatan yang dalam tataran sempit adalah masyarakat kelurahan.

Masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur juga melaksanakan dan merasakan gerak langkah pembangunan. Derap pembangunan tersebut dinahkodai oleh pemimpin di masing-masing kedua kelurahan tersebut, yakni lurah.

Lurah sebagai pemimpin wilayah kerja administratif kelurahan yang merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia dimana wilayah administratif tersebut memiliki hak mengatur wilayahnya secara lebih terbatas. Payung hukum pelaksanaan fungsi lurah tertuang di dalam Undang-Undang⁴ dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.⁵

Pembangunan sebagai bentuk perubahan ke arah pencapaian kondisi yang lebih baik memerlukan suatu perencanaan.⁶ Di Kelurahan Prailiu, perencanaan pembangunan kelurahan tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKPKEK) (Tabel 1), yang merupakan wujud pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan yang dilakukan secara terencana. Sebab, pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.⁷

“Kami sudah memberikan pelayanan yang optimal dalam mengurus administrasi di kelurahan contohnya seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Ijin Usaha, dan Surat Domisili”⁸

“Kelurahan sudah optimal dalam melayani masyarakat, cepat menanggapi keluhan masyarakat, dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan baik.”⁹

“Menurut saya lurah sudah melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan sudah cukup baik dan cepat dalam menindak lanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”¹⁰

Tabel 1. Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKPKEK) Prailiu Prioritas Jangka 1 Tahunan Tahun Anggaran 2023

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Sasaran/ Manfaat	Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Permasalahan
1.	Fisik Prasarana Kelurahan: - Pembangunan	Kel.	Mencegah	Dinas	- Kerjasama	Peme-	Adanya

⁴ Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

⁶ Subandi

⁷ Subandi

⁸ Hasil wawancara dengan staf Kelurahan Prailiu, Bpk. Jack Simanjuntak, tanggal 12 Juni 2023

⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Prailiu, Bpk. Martinus Kalaway, tanggal 15 Juni 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Lisni Rambu Naha, tanggal 19 Juni 2023.

an saluran drainase keliling Lapangan Prailiu	Prailiu	genangan air dan menciptakan lingkungan yang bersih	PU, APBD, APBN	antar desa	rintah	genangan yang tinggi pada musim hujan
- Pengaspalan jalan lingkungan RT	RT.09 – RT. 12	Meningkatkan dan mempermudah transportasi	Dinas PU, APBD, APBN	- Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Pemerintah Pusat, Kabupaten	Jalan yang rusak pada musim hujan
- Pembuatan got saluran cacing secara permanen	RT 13, 14, 15, dan 16	Mencegah terjadinya genangan pada musim hujan	APBD	- Swa-kelola - Kerjasama antar desa - Kerjasama dengan pihak ketiga	Kabupaten	Terjadinya genangan pada musim hujan
- Pembangunan lapak penjualan sembako, ikan, sayur dan rumah makan	Kel. Prailiu	Meningkatkan pendapatan masyarakat	APBN, APBD	- Swa-kelola - Kerjasama antar desa - Kerjasama dengan pihak ketiga	Kabupaten	Terbatasnya lapak penjualan
- Pembangunan rumah layak huni	Kel. Prailiu	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Dinas Sosial, Nakertrans, Dinas PU, BPMD	- Kerjasama dengan pihak ketiga	Kabupaten	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni
2. Bidang Ekonomi:						
- Bantuan modal/peralatan kelompok penjual ikan, sayur dan rumah makan di lapak Pasar Padadita	Kel. Prailiu	Meningkatkan pendapatan penjual ikan	Dinas Sosial, DPMD, DPMK	-	Kabupaten	Terbatasnya modal pedagang
- Pendistribusian ternak	31 RT	Meningkatkan produksi	APBN, APBD, Disnak	- Swa-kelola - Kerjasama antar desa	Pemerintah Pusat,	Meningkatkan produkti-

kepada masyarakat (kambing 1000 ekor, babi 80 ekor, dan ayam 800 ekor)		hasil peternakan		- Kerjasama dengan pihak ketiga	Provinsi & Kabupaten	vitasi para peternak
- Pengadaan kompressor, alat bengkel lainnya dan mesin jahit, mesin obras	Pemuda Karang Taruna	Meningkatkan lapangan kerja bagi para pencari kerja.	Dinkesos, Disnakertrans, DPMK	- Swa-kelola - Kerjasama antar desa - Kerjasama dengan pihak ketiga	Kabupaten	Mengurangi pengangguran
- Pengadaan mesin potong rumput	31 RT/10 RW	Peningkatan produktifitas pertanian dan menjaga kebersihan lingkungan	APBD/DPMK	- Swa-kelola - Kerjasama antar desa - Kerjasama dengan pihak ketiga	Kabupaten	Minimnya alat potong rumput di setiap RT

Sumber: Sekretariat Kelurahan Prailiu, 2023.

3.1. Pelaksanaan program peningkatan pembangunan khususnya sarana dan prasarana

Fungsi lurah dalam pelaksanaan program peningkatan pembangunan khususnya sarana dan prasarana merupakan implementasi dari salah satu fungsi yang diemban kelurahan yakni pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan.¹¹ Pelaksanaan program peningkatan pembangunan khususnya sarana dan prasarana di kedua kelurahan terangkum di dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambara Kabupaten Sumba Timur

No.	Program Sarana dan Prasarana	Sasaran/Manfaat	Permasalahan
1.	Pembangunan pasar Kelurahan Prailiu	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Terbatasnya pusat penjualan barang-barang kebutuhan masyarakat
2.	Pembangunan jalan raya (aspal) dan jalan setapak (perkerasan) kelurahan dan lingkungan RT	Meningkatkan dan mempermudah transportasi	Kondisi belum seluruhnya bagus, masih ada yang rusak terlebih pada musim hujan
3.	Pembangunan saluran	Mencegah terjadinya	Terjadinya genangan pada

¹¹ Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

	drainase (got saluran cacing) permanen keliling Lapangan Prailiu, kelurahan dan lingkungan RT	genangan pada musim hujan dan menciptakan lingkungan yang bersih	musim hujan
4.	Pemberian bantuan berupa perahu ketinting dan pukot kepada masyarakat kelompok penjual ikan	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Terbatasnya modal masyarakat kelompok penjual ikan
5.	Pemberian bantuan berupa ternak babi, kambing dan ayam petelur kepada masyarakat peternak	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Terbatasnya modal masyarakat peternak
6.	Pemberian bantuan berupa gerobak penjualan sayur kepada masyarakat penjual sayur	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Terbatasnya modal masyarakat penjual sayur
7.	Pembangunan lapak penjualan di Pasar Padadita bagi masyarakat penjual makanan dan minuman, usaha rumah makan, penjual ikan dan penjual sayur	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Terbatasnya lapak penjualan yang teratur dan tertata rapi bagi masyarakat
8.	Pembangunan rumah layak huni	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat misikin	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni
9.	Pemberian bantuan peralatan kerja perbengkelan berupa kompresor, alat bengkel listrik, bengkel service dan bengkel mesin kepada masyarakat dan pemuda yang membuka usaha bengkel	Meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan meningkatkan lapangan kerja bagi para pencari kerja	Terbatasnya modal masyarakat, lapangan kerja dan mengurangi pengang-guran
10.	Pemberian bantuan peralatan kerja perbengkelan berupa mesin jahit, dan mesin obras kepada kelompok masyarakat penjahit	Meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan meningkatkan lapangan kerja bagi para pencari kerja	Terbatasnya modal masyarakat, lapangan kerja dan mengurangi pengang-guran
11.	Pemberian bantuan peralatan pertanian berupa mesin potong rumput kepada	Peningkatan produktifitas pertanian dan menjaga kebersihan lingkungan	Minimnya alat potong rumput di setiap RT

	masyarakat petani				
12.	Pemberian bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu, stunting, bumil gizi kurang dan gizi buruk	Peningkatan kesehatan masyarakat	status kesehatan masyarakat	Status masyarakat optimal	kesehatan masyarakat belum

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

*"...(kelurahan) tidak melaksanakan (pembangunan) infrastuktur, biasa (kelurahan) menampung aspirasi masyarakat ketika musrembang kelurahan kemudian ajukan ke kabupaten dan pemerintahan kabupaten nanti yang akan menindak-lanjutinya."*¹²

*"...(kelurahan) sudah melaksanakan pembangunan infrastuktur seperti jalan raya dan jalan setapak.... dalam hasil musrembang Kelurahan Prailiu masyarakat selalu mengusulkan pembangunan infrastuktur dan sudah ditindak-lanjuti terkait dengan pembangunan jalan dan drainase dan juga program lain yang akan dilaksanakan.."*¹³

"Pembangunan fisik seperti jalan sudah baik hanya masih ada beberapa titik yang belum sepenuhnya bagus"^{14, 15, 16, 17}

*"Pembangunan infrastuktur sudah cukup baik dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kelurahan sini."*¹⁸

*"Pembangunan akses jalan di sini"*¹⁹

3.2. Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat

Konsep pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi di mana sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.²⁰

*"Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di sini kelurahan mengadakan pembentukan kelompok seperti kelompok nelayan diberikan bantuan berupa perahu ketinting dan pukat, kelompok peternakan diberikan (ternak) babi, kambing dan ayam petelur, dan untuk yang usaha perbengkelan diberikan peralatan kerja dan modal usaha, dan kelompok tenun ikat diberikan bantuan benang, dan yang mempunyai usaha kios diberikan bantuan modal usaha dan pinjaman lunak dari dana swa."*²¹

*"Lurah sudah melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan sudah cukup baik dan cepat dalam menindak-lanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat."*²²

*"....perahu kepada nelayan, dan bibit sayur pada petani."*²³

¹² Hasil wawancara dengan Lurah Kambaniru, Bpk. Deni Ch. Elia Elo, S.Pd., tanggal 8 Juni 2023

¹³ Hasil wawancara dengan Lurah Prailiu, Bpk. Petrus Kalaway, SE., tanggal 12 Juni 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Tita Padji, tanggal 20 Juni 2023

¹⁶ Hasil wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Marthen Landu, tanggal 20 Juni 2023

¹⁷ Hasil wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Lisni Rambu Naha, tanggal 19 Juni 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Marthen Landu, tanggal 20 Juni 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Prailiu, Bpk. Apris Milanau, tanggal 15 Juni 2023

²⁰ W.W Rostow, dalam Abdul

²¹ Hasil wawancara dengan Lurah Prailiu, Bpk. Petrus Kalaway, SE., tanggal 12 Juni 2023

²² Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Lisni Rambu Naha, tanggal 19 Juni 2023

²³ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Tita Padji, tanggal 20 Juni 2023

“...program kelurahan yang membantu kesejahteraan masyarakat ada mengenai tenun ikat bantuan berupa benang, budidaya ikan, dan ternak, dan sudah banyak program yang pemerintah dalam hal kelurahan jalankan, adanya juga bantuan pukat dan perahu kepada nelayan, bidang pertanian adanya bantuan berupa traktor, mesin potong rumput.”²⁴

“Lurah sudah optimal dan luar biasa dalam melakukan pelayanan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan baik. Dan lurah juga terjun langsung dalam melakukan pelayanan.”²⁵

a. Aspek Keamanan

Salah satu fungsi lurah tampak dalam penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.²⁶

Tabel 3. Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat pada Indikator Keamanan di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

No.	Program Keamanan	Sasaran/ Manfaat	Permasalahan
1.	Koordinasi dengan Ketua RT untuk mendengarkan dan menindak-lanjuti keluhan masyarakat	Membangun keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Masih terdapat anggota masyarakat berusia remaja dan pemuda yang berperilaku mengganggu keamanan
2.	Pendekatan persuasif kepada para orang tua	Membangun keterlibatan dan peran aktif orang tua dalam menjaga keamanan lingkungan	Masih terdapat anggota masyarakat berusia remaja dan pemuda yang berperilaku mengganggu keamanan
3.	Pelibatan pihak berwajib aparat kepolisian setempat	Pendidikan keaamanan melalui pengayoman kepada anggota masyarakat	Masih terdapat anggota masyarakat berusia remaja dan pemuda yang berperilaku mengganggu keamanan

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

²⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Prailiu, Bpk. Martinus Kalaway, tanggal 15 Juni 2023

²⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

“Upaya yang dilakukan kelurahan bersama RT dan RW dalam meningkatkan pembangunan ialah dengan mengundang langsung RT dan RW ke kelurahan untuk membahas apa yang menjadi kendala masyarakat.”²⁷

“Pelayanan kelurahan ke masyarakat sudah optimal dan kelurahan sendiri cepat dalam menanggapi persoalan seperti masyarakat yang memiliki masalah sangketa tanah di mana kelurahan dengan cepat menanggapi.”²⁸

“Pelayanan Kelurahan Kambaniru sudah optimal dalam melayani masyarakat di kelurahan ini. Kendala yang dialami adalah ketika perilaku remaja di kelurahan yang sangat meresahkan masyarakat dan itu pihak kelurahan menindak tegas dengan pergi bertemu dengan orang tua masyarakat dan memberi tahu agar anaknya mohon dididik dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan di kelurahan sini”²⁹

“Dalam mengatasi permasalahan perilaku remaja yang melanggar ketentraman dan ketertiban masyarakat disini dalam hal ini RT melaporkan ke kelurahan. Beberapa kali ditegur oleh pihak RT namun remaja masih melakukan hal yang mengganggu ketenteraman masyarakat (maka) kami dari pihak kelurahan pun menindak-lanjuti apa yang sudah disampaikan oleh RT dan melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian Sumba Timur untuk mengamankan remaja yang selalu meresahkan masyarakat”³⁰

b. Aspek kesehatan

Fungsi lurah lainnya tampak dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan..³¹

Tabel 4. Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat pada Indikator Kesehatan di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur

No.	Program Kesehatan	Sasaran/Manfaat	Permasalahan
1.	Penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kondisi perekonomian masyarakat relatif masih belum optimal bagi pemeliharaan kesehatan
2.	Penyaluran bantuan usaha kepada masyarakat.	Menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat memiliki kecukupan dana bagi pemeliharaan kesehatan.	Kondisi perekonomian masyarakat relatif masih belum optimal bagi pemeliharaan kesehatan
3.	Pemberian bantuan berupa peralatan kesehatan bagi Posyandu, <i>Stunting</i> , Bumil Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Peningkatan status kesehatan masyarakat	Status kesehatan masyarakat belum optimal
4.	Kerjasama dengan pihak	Untuk memperoleh bantuan	Masih terdapat

²⁷ Hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kambaniru, Ibu Frida Paratu, A.Md., tanggal 8 Juni 2023

²⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Lisni Rambu Naha, tanggal 19 Juni 2023

²⁹ Hasil wawancara dengan staf Kelurahan Kambaniru, Bpk. Julius H. Tari, tanggal 8 Juni 2023

³⁰ Hasil wawancara dengan staf Kelurahan Prailiu, Bpk. Jack Simanjuntak, S.TP., tanggal 12 Juni 2023

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

ketiga	sosial dan bantuan usaha permasalahan kepada masyarakat untuk kesehatan dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat masyarakat maupun bantuan langsung kepada masyarakat
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

*“Program kelurahan yang sudah dijalankan (adalah) adanya bantuan kepada masyarakat berupa ayam pedaging, membuat kios atau rombongan jualan pada pelaku UMKM, ada kerja sama juga dengan Pelindo dan mendapatkan bantuan kios, bantuan babi, bantuan makanan tambahan berupa susu, suplemen pada penderita stunting.”*³²

*“...bersama dengan masyarakat kami sudah menjalankan program dari pemerintah terkait dengan peningkatakan kesejahteraan masyarakat seperti adanya bantuan sosial, ternak, benang, peralatan bengkel dan juga modal usaha untuk pelaku UMKM.”*³³

*“Kegiatan atau program yang sudah dijalankan iya adanya sosialisasi terhadap anak yang stunting, ada juga bantuan sosial ketika seroja ada bantuan sosial seperti seng, semen pada rumah warga yang terkena dampak”*³⁴

c. Aspek sumber daya manusia (tingkat pendidikan)

Salah satu unsur pokok dalam pembangunan adalah manusia, termasuk di dalamnya adalah masyarakat, baik yang menjadi pengambil inisiatif sebagai manusia pembangun maupun juga sebagai sasaran pembangunan itu sendiri agar proses transformasi masyarakat menuju keadaan lain semakin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan. Sebab, bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia.

Pelaksanaan fungsi lurah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada indikator sumber daya manusia ini merupakan implementasi dari fungsi-fungsi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong-royong masyarakat.³⁵

Tabel 5. Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat pada Indikator Sumber Daya Manusia (Tingkat Pendidikan) di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur

No.	Program Sumber Daya Manusia	Sasaran/Manfaat	Permasalahan
1.	Penyaluran bantuan usaha ekonomi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat bagi peningkatan kreativitas produktif masyarakat	Kondisi perekonomian masyarakat masih belum memadai bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia
2.	Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat	Kondisi perekonomian masyarakat masih belum memadai bagi peningkatan kualitas sumber daya

³² Hasil wawancara dengan Lurah Kambaniru, Bpk. Deni Ch. Elia Elo, S.Pd., tanggal 8 Juni 2023

³³ Hasil wawancara dengan staf Kelurahan Prailiu, Bpk. Jack Simanjuntak, S.TP., tanggal 12 Juni 2023

³⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

			manusia
3.	Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong-royong masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat	Kondisi perekonomian masyarakat masih belum memadai bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia
4.	Kerjasama dengan pihak ketiga	Untuk memperoleh bantuan sosial dan bantuan usaha kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat bagi peningkatan kreativitas produktif masyarakat	Kondisi perekonomian masyarakat masih belum memadai bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

“Program kelurahan yang sudah dijalankan (adalah) adanya bantuan kepada masyarakat berupa ayam pedaging, membuat kios atau rombongan jualan pada pelaku UMKM, ada kerja sama juga dengan Pelindo dan mendapatkan bantuan kios, bantuan babi...” ³⁶

“Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di sini kelurahan ada kan pembentukan kelompok seperti kelompok nelayan, kelompok perternakan, untuk yang usaha perbengkelan, dan kelompok tenun ikat...” ³⁷

“Upaya yang dilakukan kelurahan ialah dengan mengundang langsung RT dan RW ke kelurahan untuk membahas apa yang menjadi kendala masyarakat” ³⁸

“Kegiatan atau program yang sudah dijalankan iya adanya sosialisasi terhadap anak yang stunting...” ³⁹

d. Aspek pencemaran lingkungan

Lingkungan yang tercemar dapat berdampak tidak saja pada degradasi kualitas lingkungan namun juga pada kualitas masyarakat maupun kualitas kehidupan masyarakat.

Tabel 6. Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat pada Indikator Perlindungan Pencemaran Lingkungan di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur

No.	Program Perlindungan Pencemaran Lingkungan	Sasaran/Manfaat	Permasalahan
1.	Pemberian bantuan pembuatan kios	Tersedianya sarana berjualan bagi masyarakat sehingga lebih rapi	Meminimalisir pembuangan sampah sembarangan sehingga berserakan potensi secara berserakan

³⁶ Hasil wawancara dengan Lurah Kambaniru, Bpk. Deni Ch. Elia Elo, S.Pd., tanggal 8 Juni 2023

³⁷ Hasil wawancara dengan Lurah Prailiu, Bpk. Petrus Kalaway, SE., tanggal 12 Juni 2023

³⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kambaniru, Ibu Frida Paratu, A.Md., tanggal 8 Juni 2023

³⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

	dan rombongan teatur di banyak tempat jualan	
2.	Pembangunan pasar dan lapak berjualan	Tersedianya tempat berjualan yang terpusat, teratur dan tertata rapi
3.	Pembangunan drainase	Mencegah genangan air dan menciptakan lingkungan yang bersih

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

“Program kelurahan yang sudah dijalankan adanya bantuan kepada masyarakat berupa ... membuat kios atau rombongan jualan pada pelaku UMKM,”⁴⁰

“...sudah melaksanakan pembangunan insfrastuktur seperti pembangunan... Pasar Prailiu..., pembangunan drainase...”⁴¹

Bantuan berupa pembuatan kios dan rombongan jualan bagi pelaku UMKM yang diberikan pihak kelurahan bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kekumuhan sehingga mencegah pencemaran.

Pembangunan pasar dan kios yang tertata akan meminimalisir kemungkinan pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah yang dibuang sembarangan.

Pembangunan drainase sebagai saluran air ditujukan untuk mencegah genangan air berlebih terlebih pada musim hujan akibat adanya genangan yang tinggi pada musim hujan, dan menciptakan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dapat tercipta jika lingkungan tidak tercemar.

4. Faktor-faktor Penghambat Fungsi Lurah Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

Upaya yang dilakukan lurah dalam menjalankan fungsinya bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang diimplementasikan belum berjalan mulus dan mencapai hasil ideal, dalam artian telah terpenuhi dan terlaksana seluruhnya, seperti yang sudah direncanakan. Upaya-upaya tersebut masih menghadapi kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat realisasi program.

“Lurah sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan juga ada belum dilaksanakan jadi 50% sudah dan 50% belum mengerjakannya, kira-kira begitu”⁴²

“Pelayanan dari kelurahan kurang optimal dalam mejalankan tugasnya..., lurah sudah melaksanakan tugas dengan bagus terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tapi ada beberapa juga yang tidak sesuai dengan sistem”⁴³

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Lurah Kambaniru, Bpk. Deni Ch. Elia Elo, S.Pd., tanggal 8 Juni 2023

⁴¹ Hasil wawancara dengan Lurah Prailiu, Bpk. Petrus Kalaway, SE., tanggal 12 Juni 2023

⁴² Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Prailiu, Bpk. Apris Milanau, tanggal 15 Juni 2023

⁴³ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Prailiu, Bpk. Erens Rawambaku, tanggal 16 Juni 2023

a. Sarana dan prasarana

“Lurah sudah mengerjakan tugasnya dengan baik hanya memang masih banyak juga.... belum melaksanakan”⁴⁴

Pernyataan di atas mengindikasikan masih terdapatnya kendala bagi lurah di kedua kelurahan tersebut dalam menjalankan fungsinya secara optimal..

“Penanganan kelurahan secara fisik tentu masih banyak jalan yang masih rusak jalan memang masih banyak yang rusak dan itu juga yang menjadi keluhan masyarakat..”⁴⁵

“Pembangunan fisik seperti jalan sudah baik hanya masih ada beberapa titik yang belum sepenuhnya bagus..”^{46, 47}

“Pembangunan jalan di kelurahan sini masih ada juga yang memiliki kerusakan hanya banyak dari masyarakat sini yang mengeluhkan terkait dengat jalan setapak yang rusak dan sebagian jalan raya juga yang rusak dan menghambat dalam melewati jalan tersebut..”⁴⁸

“Pembangunan fisik atau infrastruktur, kendalanya pasar Prailiu yang dibangun ... jauh dari pusat kota atau keramaian ..., dan juga akses jalan ke pasar tersebut masih banyak yang rusak,”⁴⁹

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Tersedia di Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur

No.	Sarana dan Prasarana	Sasaran/Manfaat	Permasalahan
1.	Tempat ibadah (gereja)	Peningkatan sumber daya manusia (kerohanian)	Sumber daya manusia perlu ditingkatkan (akhlak, moral dan spiritualitas)
2.	Sekolah (SD, SMP, SMA)	Peningkatan sumber daya manusia	Sumber daya manusia perlu ditingkatkan (akhlak, moral dan pengetahuan)
3.	Gedung Kantor Kelurahan serta perlengkapan teknis operasionalnya	Aktivitas pemerintahan dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat	Kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat
4.	Jalan aspal dan jalan perkerasan kelurahan dan lingkungan RT	Meningkatkan dan mempermudah transportasi	Kondisi belum seluruhnya bagus, masih ada yang rusak terlebih pada musim hujan
5.	Saluran drainase keliling Lapangan Prailiu	Mencegah genangan air dan menciptakan lingkungan yang bersih	Adanya genangan yang tinggi pada musim hujan
6.	Got saluran cacing secara permanen	Mencegah terjadinya genangan pada musim	Terjadinya genangan pada musim hujan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Tita Padji, tanggal 20 Juni 2023

⁴⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Lisni Rambu Naha, tanggal 19 Juni 2023

⁴⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

⁴⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Tita Padji, tanggal 20 Juni 2023

⁴⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Marthen Landu, tanggal 20 Juni 2023

⁴⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Prailiu, Bpk. Martinus Kalaway, tanggal 15 Juni 2023

7.	Pasar Prailiu	hujan Meningkatkan pendapatan Masyarakat	Terbatasnya pusat penjualan barang-barang kebutuhan masyarakat
8.	Lapak penjualan sembako, ikan, sayur dan rumah makan	Meningkatkan pendapatan Masyarakat	Terbatasnya lapak penjualan
9.	Rumah layak huni	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni
10.	Peralatan kelompok penjual ikan, sayur dan rumah makan di lapak Pasar Padadita	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Terbatasnya modal bagi pedagang
11.	Kompresor, Alat Bengkel Listrik, Bengkel Service dan Bengkel Mesin, Mesin Jahit, dan Mesin Obras	Meningkatkan lapangan kerja bagi para pencari kerja	Mengurangi pengang-guran
12.	Alat pertanian (mesin potong rumput)	Peningkatan produktifitas pertanian dan menjaga kebersihan lingkungan	Minimnya alat potong rumput di setiap RT
13.	Posyandu dan peralatan kesehatan bagi Posyandu, stunting, bumil gizi kurang dan gizi buruk	Peningkatan status kesehatan masyarakat	Status kesehatan masyarakat belum optimal

Sumber: Sekretariat Kelurahan Prailiu, 2023

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Tersedia di Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

No.	Sarana dan Prasarana	Sasaran/Manfaat	Permasalahan
1.	Tempat ibadah (gereja)	Peningkatan sumber daya manusia (kerohanian)	Sumber daya manusia perlu ditingkatkan (akhlak, moral dan spiritualitas)
2.	Sekolah (SD, SMP, SMA)	Peningkatan sumber daya manusia	Sumber daya manusia perlu ditingkatkan (akhlak, moral dan pengetahuan)
3.	Gedung Kantor Kelurahan serta perlengkapan teknis operasionalnya	Aktivitas pemerintahan dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat	Kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat
4.	Jalan aspal dan jalan perkerasan kelurahan dan lingkungan RT	Meningkatkan dan mempermudah transportasi	Kondisi belum seluruhnya bagus, masih ada yang rusak terlebih pada musim hujan
5.	Saluran drainase	Mencegah genangan air dan menciptakan lingkungan yang bersih	Adanya genangan yang tinggi pada musim hujan
6.	Peralatan kelompok penjual ikan, sayur	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Terbatasnya modal bagi pedagang

dan rumah makan di
lapak Pasar Padadita

Sumber: Sekretariat Kelurahan Kambaniru, 2023

“Pembangunan akses jalan di sini belum merata karena tempat kami di sini masih jauh dari jalan umum sehingga kami di sini terkait dengan jalan masih banyak yang rusak danmenjadi kendala bagi kami masyarakat.”⁵⁰

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dan vital bagi pembangunan sebab pembangunan berasal dari, dilakukan oleh, dan ditujukan bagi manusia itu sendiri.

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Aparatur Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

No.	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	Petrus Kalaway, SE	Lurah	Sarjana (S-1)
2.	Jackson Fredy Simanjuntak, S.TP	Kepala Seksi Pemerintahan	Sarjana (S-1)
3.	Tamu Rambu Hamu Eti, A.Md	Kepala Seksi Pembangunan	Ahli Madya (D-3)
4.	Sarce Lika Atahay, SE	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Sarjana (S-1)
5.	Olviai Gah	Staf Seksi Pemerintahan	SMA
6.	Deni Tay Ngunju Amah, SE	Staf Seksi Pemerintahan, (Tenaga Administrasi, PTT)	Sarjana (S-1)
7.	Florence Nalla Koreh	Staf Seksi Pembangunan	SMA
8.	Fransiskus Hendrikus Parera, SE	Staf Seksi Pembangunan (Tenaga Administrasi, PTT)	Sarjana (S-1)
9.	Anastasia Roslin Ndena, SE	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial (Tenaga Administrasi, PTT)	Sarjana (S-1)
10.	Murniati	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial (Tenaga Administrasi, PTT)	SMA

Sumber: Sekretariat Kelurahan Prailiu, 2023

Tabel 10. Tingkat Pendidikan Aparatur Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

No.	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	Deni Ch. Elia Elo, S.Pd	Lurah	Sarjana (S-1)
2.	Frida Paratu, A.Md	Sekretaris	Ahli Madya (D-3)
3.	Naema T. Maramba Hawu	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA
4.	Yublina Yulieti Pandanga, S.Ap	Kepala Seksi Pembangunan	Sarjana (S-1)
5.	Mamana D. L. Rawambaku,	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sarjana (S-1)

⁵⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Prailiu, Bpk. Apris Milanau, tanggal 15 Juni 2023

	S.Ap	Sosial	
6.	Julius H. Tari	Staf Kesekretariatan	SMA
7.	Thomas D. D. Wila	Staf Kesekretariatan	SMA
8.	Emilia T. Ndjuru Mbaha	Staf Kesekretariatan	SMA
9.	Octavianus Ia	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial	SMA
10.	Queen C. K. Manutede	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial	SMA
11.	Harison F. R. Bale	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial	SMA
12.	Kevin Adi Christian	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial	SMA

Sumber: Sekretariat Kelurahan Kambaniru, 2023

“Upaya yang dilakukan pihak kelurahan terhadap pegawai bermasalah di kelurahan tentu diberikan teguran terhadap pegawai yang bermasalah dalam melakukan pelayanan.... di Kelurahan Kambaniru.”⁵¹

Permasalahan SDM di kelurahan berkaitan dengan lambatnya pelayanan yang diberikan yang dirasakan masyarakat.

“Pelayanan di kelurahan belum sepenuhnya optimal dikarenakan ... masih lambatnya pegawai dalam melakukan pelayanan, contoh kecil dalam pengurusan administrasi belum sepenuhnya maksimal....”⁵²

“...., contoh kecil dalam pengurusan administrasi di kelurahan masih lambatnya pegawai di sinidalam pengurusan tersebut”^{53, 54}

Tidak saja lambatnya perangkat kelurahan dalam melakukan pelayanan administrasi, namun hal lain yang berkaitan dengan SDM sebagai faktor penghambat adalah kurangnya koordinasi.

“Pembagian bantuan dari pemerintah langsung dibagikan ke masyarakat dan tidak berkoordinasi dengan RT.”⁵⁵

c. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi merupakan pelaksanaan salah satu fungsi lurah yakni penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.⁵⁶

“Kegiatan atau program yang sudah dijalankan iya adanya sosialisasi....”⁵⁷

Sosialisasi program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada masyarakat diharapkan agar program-program tersebut menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.

“Upaya yang dilakukan kelurahan.... ialah dengan mengundang langsung RT dan RW ke kelurahan untuk membahas apa yang menjadi kendala masyarakat”⁵⁸

Tabel 11. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lurah pada Indikator Sosialisasi di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

⁵¹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kambaniru, Ibu Frida Paratu, A.Md., tanggal 8 Juni 2023

⁵² Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Marthen Landu, tanggal 20 Juni 2023

⁵³ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

⁵⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Prailiu, Bpk. Apris Milanau, tanggal 15 Juni 2023

⁵⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Marthen Landu, tanggal 20 Juni 2023

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kambaniru, Ibu Frida Paratu, A.Md., tanggal 8 Juni 2023

No.	Sosialisasi sebagai Faktor Penghambat	Permasalahan	Solusi
1.	Masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak kelurahan	Keterbatasan anggaran dan prioritas alokasi anggaran	Sosialisasi digiatkan terus-menerus melalui koordinasi dengan RT dan RW dalam pembahasan permasalahan warga dan bagi peningkatan pemahaman masyarakat menyangkut program-program peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

RT dan RW sebagai unit pemerintahan terkecil ketika meneruskan hasil-hasil pembahasan permasalahan warga di kelurahan kepada warga maka secara langsung telah ikut mensosialisasikan program-program pemerintah kelurahan.

*"Pihak kelurahan berkoordinasi dengan RT.... dan secara tidak langsung RT juga lebih mengetahui keluhan masyarakat karena RT merupakan pemerintahan paling terkecil."*⁵⁹

*"Pihak kelurahan berkoordinasi dengan RT.... masyarakat yang sudah didata oleh RT."*⁶⁰

Meskipun demikian, sosialisasi kepada masyarakat melalui RT dan RW juga tetap saja mengindikasikan bahwa faktor ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan fungsi lurah dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Anggaran

Anggaran merupakan rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang, atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk suatu periode.⁶¹ Anggaran merupakan salah satu elemen krusial bagi penyelenggaraan pembangunan sebab tanpa ketersediaan anggaran maka program-program pembangunan yang direncanakan tidak dapat diimplementasikan.

Tabel 12. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lurah pada Indikator Anggaran di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

No.	Anggaran sebagai Faktor Penghambat	Permasalahan	Solusi
1.	Masih minimnya ketersediaan anggaran	Anggaran kelurahan berasal dari Pemerintah Kecamatan Kampera dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	Kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi berkesinambungan dengan Pemerintah Kecamatan Kampera dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bagi peningkatan ketersediaan anggaran kelurahan dan dalam pembahasan permasalahan pelaksanaan program-program pembangunan yang dihadapi pihak kelurahan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Ibu Lisni Rambu Naha, tanggal 19 Juni 2023

⁶⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

⁶¹ Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

2.	Pemberlakuan <i>refocusing</i> (pemotongan dana) akibat adanya pandemi Covid-19	Anggaran kelurahan berasal dari Pemerintah Kecamatan Kambera dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	Kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi berkesinambungan dengan Pemerintah Kecamatan Kambera dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
----	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

“Kendala yang yang dialami pihak kelurahan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ialah anggaran yang minim. Hasil musrembang sejauh ini harusnya ditindak-lanjuti tapi itu terkait anggaran yang ada...., untuk direalisasi.... kalau anggarannya ada....”.⁶²

“Kendala yang dialami kelurahan dalam meningkatkan program pemerintah adalah anggaran yang terbatas....”.⁶³

Minimnya dan terbatasnya ketersediaan anggaran menjadi faktor dominan yang menghambat pelaksanaan fungsi lurah. Realisasi program yang telah direncanakan membutuhkan dukunga anggaran yang memadai.

Ketersediaan anggaran yang minim dan terbatas tersebut disebabkan juga oleh beberapa faktor.

“...anggaran yang terbatas akibat adanya covid 19 banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan atau ditunda karena adanya refocusing atau pemotongan dana....”.⁶⁴

Salah satu faktor penyebab minim dan terbatasnya anggaran adalah akibat adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia juga berimbas kepada pengalokasian anggaran pembangunan yang berakibat pada banyaknya program-program pembangunan yang ditunda atau dihentikan sementara karena pengalihan peruntukan ke bidang-bidang dan upaya-upaya kesehatan.

“...sebelumnya waktu itu masih ada dana DMK biasa dipakai terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat....”.⁶⁵

Minimnya dan terbatasnya ketersediaan anggaran sebagai faktor penghambat pelaksanaan fungsi lurah juga dipahami masyarakat seperti dikemukakan dalam hasil wawancara berikut.

“Kegiatan atau program yang sudah dijalankan (kelurahan)...., ada juga bantuan sosial ketika seroja dan itu tidak semua warga yang kena dampak dapat bantuan tersebut masih banyak juga yang belum dapat mengingat anggaran pemerintah yang terbatas”.⁶⁶

Pelaksanaan fungsi lurah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur dapat dikatakan telah sesuai dengan aturan dasar hukum yang diamanatkan.⁶⁷

⁶² Hasil wawancara dengan Lurah Kambaniru, Bpk. Deni Ch. Elia Elo, S.Pd., tanggal 8 Juni 2023

⁶³ Hasil wawancara dengan Lurah Prailiu, Bpk. Petrus Kalaway, SE., tanggal 12 Juni 2023

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Lurah Prailiu, Bpk. Petrus Kalaway, SE., tanggal 12 Juni 2023

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Lurah Kambaniru, Bpk. Deni Ch. Elia Elo, S.Pd., tanggal 8 Juni 2023

⁶⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat Kambaniru, Bpk. Gerald Laos, tanggal 19 Juni 2023

⁶⁷ Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa desa mengemban kewajiban yakni dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, yang juga tampak dari hasil penelitian ini.

5. Kesimpulan

1. Lurah di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur telah menjalankan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan meskipun belum maksimal.
 - a. Fungsi lurah dalam pelaksanaan program peningkatan pembangunan khususnya sarana dan prasarana di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana berupa pasar dan bantuan berupa perahu ketinting dan pukot, ternak babi, kambing, dan ayam petelur, serta peralatan kerja perbengkelan yang disalurkan kepada masyarakat, dan prasarana berupa pembangunan jalan raya dan jalan setapak serta saluran drainase.
 - b. Fungsi lurah dalam pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur telah dilaksanakan dengan baik.
 - 1) Pada indikator keamanan, dilakukan melalui koordinasi dengan Ketua RT untuk mendengarkan dan menindak-lanjuti keluhan masyarakat, pendekatan persuasif kepada para orang tua, dan pelibatan pihak berwajib aparat kepolisian setempat sebagai upaya terakhir.
 - 2) Pada indikator kesehatan, dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial dan bantuan usaha kepada masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga. Bantuan usaha diberikan agar perekonomian masyarakat bergerak sehingga masyarakat memiliki kecukupan dana bagi pemeliharaan kesehatan. Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan untuk memperoleh bantuan kepada masyarakat, baik bagi peningkatan usaha ekonomi masyarakat maupun langsung kepada anggota masyarakat yang memiliki permasalahan kesehatan.
 - 3) Sumber daya manusia (tingkat pendidikan), dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong-royong masyarakat.
 - 4) Pencemaran lingkungan, dilakukan melalui pemberian bantuan pembuatan kios dan rombong jualan, pembangunan pasar dan pembangunan drainase.

2. Faktor-faktor penghambat fungsi lurah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur terdiri dari:
 - a. Sarana prasarana, pembangunan sarana dan prasarana tergantung pada ketersediaan dana di kelurahan, kondisi jalan raya maupun jalan setapak yang belum sepenuhnya bagus dan masih terdapat kerusakan di beberapa titik, lokasi pasar yang kurang strategis, kerusakan di beberapa titik akses jalan ke pasar, hingga pembangunan akses jalan yang belum merata karena jauh dari jalan umum.
 - b. Sumber daya manusia (SDM), berkaitan dengan lambatnya pelayanan yang diberikan perangkat kelurahan kepada masyarakat maupun adanya indikasi pungutan liar (pungli) yang dirasakan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan, dan kurangnya koordinasi antar perangkat kelurahan. Upaya penanganan permasalahan SDM kelurahan dilakukan dengan pemberian teguran.
 - c. Sosialisasi, yakni minimnya sosialisasi kepada masyarakat menyangkut program-program peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat oleh pihak kelurahan. Sosialisasi dilakukan melalui koordinasi dengan RT dan RW dalam pembahasan permasalahan warga.
 - d. Anggaran, berkaitan dengan minimnya ketersediaan anggaran, baik akibat kurangnya intensifikasi musyawarah demokratis berkesinambungan dengan praktisi birokrasi pemerintahan Kabupaten maupun akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan *refocusing* atau pemotongan dana dan prioritas alokasi anggaran.

REFERENSI

Buku

- Adriyan, D. N. *"Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik."* Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Arimbi, Achmad Santosa. *"Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan."* Jakarta: Walhi, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara."* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *"Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi."* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dwipayana, A.A.G.N. *"Membangun Good Governance."* Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hadi, A. P. *"Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan."* Jakarta: Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), 2010.
- Imawan, Riswanda, *"Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance."* Makalah. Jakarta, 2002.
- Manan, Bagir. *"Supermasi Hukum, Good Governance dan Penguatan Instansi Daerah"*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia, Bekerjasama dengan AusAID, 2002.
- Monteiro, Josef Mario, *"Metode Penelitian dan Penulisan Hukum."* DeePublish: CV. Budi Utama, 2020.

- Monteiro, Josef Mario. *"Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah."* Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Pulukadang, Ishak. *"Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Kota Manado di Bidang Pemerintahan Yang Baik."* Makalah. Manado: FISIP Unsrat. Manado, 2002.
- Pustaka, *Dokumen Kebijakan UNDP: "Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, dalam Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia."* Jakarta, 1997.
- Suharto. *"Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat."* Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Suhardono, Edi, dkk. *"Good Governance Untuk Daulat Siapa?."* Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2001.
- Sedarmayati. *"Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan."* Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Tambunan, A. S. S. *"Hukum Tata Negara Perbandingan."* Cetakan Pertama. Jakarta: Puporis, 2001.
- Wahyudi, A. *"Hukum Tata Negara Indonesia."* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Yamin, Muhammad. *"Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya."* Jakarta, 1982.
- Zaini, A. *"Pengantar Hukum Tata Negara."* Jakarta: Sinar Pustaka, 1991.
- Zullcarnain, H. B. *"Kendala Terwujudnya Good Governance."* Jakarta, 2002.

Jurnal

- Almahmudi, N. M. T. "Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam". *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1.(2), (2019): 1-19.
- Baharuddin, M., Qamar, N., & Qahar, A. "Implementasi Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Studi Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1 (1) (2020): 134-147.
- Fadilah, N. "Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam". *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1 (1) (2020): 49-67.
- Nugroho, S., "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan". *Jurnal Cita Hukum* 1 (2) (2013).
- Suparmoko, M. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional". *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9 (1) (2020).

Disertasi

- Ritonga, I. S. *"Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas dan Fungsi Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur."* Doctoral Dissertation. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumba Timur yang bersumber pada Dana Alokasi Umum Murni dan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

Internet

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/08/093000769/pengertian-pemerintahan-dalam-arti-sempit-dan-luas>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya>

<https://www.gramedia.com/literasi/otonomi-daerah/>

[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/15-Article%20Text-145-1-10-20201001%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/15-Article%20Text-145-1-10-20201001%20(1).pdf)